

Tim Reformasi Polri Masih Misteri

Dari Halaman 1

Yogyakarta, DIY, Minggu (26/10). Setelah mengiyakan bergabung dalam komite reformasi Polri, Mahfud mengaku belum menerima kabar lanjutan, termasuk, soal personel lainnya dari komite ini.

"Habis itu saya enggak tahu perkembangannya dan saya juga tidak mau tanya ke Istana atau ke siapa. Nanti dikira saya ingin atau (punya maksud) apa, saya kan cuma bersedia," ujar Mahfud.

"Tapi saya tidak pernah bertanya ke siapa pun dan tidak pernah memberi penjelasan juga ke siapa pun tentang itu," sambungnya.

Mahfud mengaku sejauh ini tidak berbincang dengan Mantan Wakilpolri, Ahmad Dofiri yang ditunjuk selaku Penasihat Khusas Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian. Baik Mahfud dan Dofiri hari ini menghadiri acara yang sama di Sasono Hinggil Dwi Abad, Keraton Yogyakarta.

"Ndak, ndak. Kita ndak pernah (ngobrol soal tim reformasi Polri)," ucapnya.

Mahfud bilang dirinya justru sering berkomunikasi dengan para menteri kabinet atau

orang-orang di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tapi, saya menghindari untuk menanyakan itu (komite reformasi Polri), karena saya tahu tidak mudah pertimbangannya, jadi biar presiden mengolah dengan sebaik-baiknya, apapun nanti hasilnya ya kita tunggu aja," katanya.

Ungkap Alasan

Eks Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan, Jaleswari Pramodhawardhani sebelumnya meminta Prabowo mengungkap alasan tak kunjung mengumumkan personel tim komite reformasi Polri.

Tim Reformasi Polri bakal dibentuk Presiden RI Prabowo Subianto buntut gelombang demo 25-31 Agustus lalu. Dalam gelombang demo di seluruh Indonesia itu setidaknya 10 orang tewas, salah satunya pengemudi ojol Affan Kurniawan yang dilindas rantis Brimob.

Jaleswari yang juga Kepala lembaga think tank Laboratorium 45 itu menyayangkan pemerintah hingga saat ini belum mengumumkan komite tersebut. Padahal komite reformasi Polri kini sangat dibutuhkan karena berada di momentum yang tepat.

"Ini sangat disayangkan. Karena tiba-tiba,

hal sebetulnya penting sekali, momentumnya juga tepat, waktu itu reaksi untuk mereformasi Polri, agar bertransformasi," kata Jaleswari dalam rilis setahun kinerja Prabowo-Gibran, Jakarta, Rabu (22/10).

Menurut dia, saat ini ada catatan kritis dari masyarakat yang menginginkan agar Polri segera direformasi. Tuntutan tersebut menurut dia harus segera direspons.

Kata Jaleswari, pemerintah juga harus mengungkap alasan komite tersebut tak kunjung diumumkan. Menurut dia, jangan sampai publik memiliki persepsi bahwa segala persoalan bisa larut dan menghilang begitu saja.

Sementara Juru Bicara Istana sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan belum diumumkannya susunan Komite Reformasi Kepolisian oleh Prabowo.

Prasetyo berkata pemerintah belum mendapat waktu yang pas untuk mengumumkan kesembilan anggota Komite Reformasi tersebut.

Dia membantah apabila belum diumumkan nya susunan Komite Reformasi lantaran ada perubahan nama anggota. Prasetyo memastikan susunan komite telah terbentuk, termasuk di dalamnya sosok eks Menko Polhukam Mahfud MD.**(cnni/js)**

Mahfud MD Bersedia Diperiksa KPK

Dari Halaman 1

Yogyakarta, DIY, Minggu (26/10). "Enggak berhak dia (KPK) mendorong, laporan itu enggak ada kewajiban orang melapor," ujar dia.

Lagipula, lanjut Mahfud, KPK sudah mengetahui isu ini. Menurutnya, dugaan mark up di proyek Whoosh sudah mengemuka bahkan sebelum ia membincangkannya lewat kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025.

"Wong, yang saya laporkan (di YouTube) itu KPK udah tahu, karena sebelum saya ngomong udah ramai duluan kan. Saya cuma ngomong karena udah ramai aja. Mestinya, KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya (soal Whoosh), itu kan banyak banget dan punya data, dan pelaku (kebijakan)," ucapnya.

KPK sebelumnya mendorong Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada 20 Oktober lalu menyatakan, budbaganya akan bertindak secara proaktif dalam menindaklanjuti laporan

aduan masyarakat tersebut.

Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official, mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk pengelembungan anggaran di proyek Whoosh.

"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," katanya.

Ia melanjutkan, "Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah, itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini."

KPK pada Kamis (16/10) mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan korupsi dalam proyek Whoosh.

Mahfud kemudian merespons KPK dalam cuitan di akun media sosial X pribadinya. @mohmahfudmd, yakni pada Sabtu (18/10). Ia mengaku bingung karena KPK meminta dirinya melaporkan dugaan mark up Whoosh.

Mahfud menjelaskan dalam hukum pidana,

lembaga penegak hukum bisa langsung melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan.

"Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa juga memanggil sumber info untuk dimintai keterangan," ujar Mahfud dalam cuitan di akun X.

Mahfud mengatakan laporan hanya diperlukan apabila ada peristiwa yang tidak diketahui oleh aparat penegak hukum, seperti kasus penemuan mayat. Hanya saja, apabila penemuan mayat tersebut telah diberitakan secara luas, aparat penegak hukum wajib membuka penyelidikan tanpa perlu laporan langsung.

"Dalam kaitan dengan permintaan agar saya membuat laporan, ini kekeliruan yang kedua dari KPK. Yang berbicara soal kemelut Whoosh itu sumber awalnya bukan saya. Seperti saya sebut di podcast terus terang yang awalnya menyiarkan itu adalah NusantaraTV dalam rubrik 'Prime Dialog' edisi 13 Oktober 2025 dengan narasumber Agus Pambago dan Antony Budiawan," ucap dia.**(cnni/js)**

Butet Sebut Program MBG Panen Keracunan

Dari Halaman 1

keracunan makanan secara massal tidak pernah terjadi sebelum program MBG.

"Hari ini, kita panen orang keracunan karena MBG dan itu seakan-akan menjadi hal yang biasa," kata Butet.

Butet berharap kejadian keracunan MBG tak lantas dinormalisasi. Menurutnya, sudah sepantasnya program ambisius Presiden Prabowo Subianto itu dikritik.

"Satu siswa keracunan itu jumlahnya terlalu banyak. Kita tidak bisa menganggap ribuan orang keracunan sebagai suatu hal yang biasa," ujarnya.

Selain MBG, Butet juga menyatakan keprihatinnya soal hilangnya etika dan tata krama di negara ini. Dia mencontohkan seorang mantan pejabat negara yang terang-terangan menyatakan dirinya menjilat untuk bisa bersaing.

Dia juga mempertanyakan Komite Reformasi Polri yang menurutnya hanya bentuk umbar janji penguasa.

"Pemimpin boleh berjanji, tapi sekaligus boleh mengingkari. Sedih, iki model apa. Saya membayangkan pemimpin itu adalah guru yang wajib digugu (dipatuhi) dan ditiru, diteladani. Lah kok sekarang saya seperti kesulitan mendapatkan pemimpin yang pantas saya teladani untuk menjadi Indonesia damai," ucapnya.

Sambil mengutip pesan dari KH. Ahmad Dahlan, Butet mengajak untuk mengkritisi hal-hal yang ia utarakan ini.

"Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Hari ini, apa yang kita lihat yang seakan-akan menjadi biasa itu harus kita kritisi. Itu tidak biasa," ujar Butet.

"Etika hari ini memang sedang ambyar," tutupnya.

Drone Rusia Serang Ibu Kota Ukraina

Dari Halaman 1

gedung hunian berlantai 16 di distrik utara Obolonsky hingga merusak salah satu apartemen.

Serangan ini terjadi sehari setelah serangan drone dan rudal Rusia lainnya menewaskan em-

pat orang dan melukai sekitar 20 orang di Kyiv, menurut otoritas Ukraina.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ragu adanya pertemuan puncak dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, dengan mengatakan bahwa ia "tidak akan membuang-buang waktu."

Bobby Beri Kerja 120 Anak-anak SI

Dari Halaman 1

memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Kali ini, Syarikat Islam berulang tahun ke-120, jadi saya kasih kado. Tolong didata ibunya yang punya anak siap kerja," ujar Bobby di Medan, Sabtu (25/10/2025).

Bobby menyebut Pemprov Sumut tengah membuka peluang besar bagi 12.000 tenaga kerja baru untuk ditempatkan di Kawasan Industri Sei Mangkei (KISMK) — kawasan industri strategis nasional yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumut.

"Tahun ini kita siapkan 3.000 kuota tenaga kerja, dan tahun depan 9.000 lagi. Jadi total ada 12.000 tenaga kerja baru yang akan kita salurkan ke Sei Mangkei," jelas Bobby.

Sebagai bentuk perhatian khusus, Gubsu juga menyiapkan 120 kuota pekerjaan khusus bagi

anak-anak muda dari keluarga besar Syarikat Islam, sesuai dengan angka usia 120 tahun organisasi tersebut.

"Khusus untuk Syarikat Islam, anak-anaknya yang butuh kerja di Sei Mangkei nanti akan kita bantu. Syarat dan kriterianya akan kami sampaikan. Ini kado kecil dari pemerintah untuk perjuangan panjang Syarikat Islam," ungkapnya disambut tepuk tangan para hadirin.

Langkah Bobby Nasution ini dinilai sebagai wujud nyata kepedulian terhadap pemberdayaan ekonomi umat dan penciptaan lapangan kerja produktif.

Selain membuka peluang di sektor industri, program tersebut juga memperkuat komitmen Pemprov Sumut dalam mendorong pemerataan kesempatan kerja hingga ke daerah-daerah.

Bobby menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam melihat anak-anak muda menganggur. Ia bertekad menjadikan Sumut sebagai

provinsi dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, di mana setiap warga memiliki akses untuk maju.

"Anak-anak muda Sumatera Utara harus jadi pelaku, bukan penonton. Punya pekerjaan, punya penghasilan, dan bisa bantu orang tua. Itu baru merdeka sesungguhnya," tegasnya.

Perayaan 120 tahun Syarikat Islam di Sumatera Utara kali ini menjadi momen bersejarah. Tak sekadar seremonial, tetapi juga momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam membangun ekonomi rakyat.

Kado 120 lapangan kerja dari Gubsu Bobby Nasution bukan hanya simbol angka, tetapi pesan moral: bahwa pemerintah hadir untuk menyejahterakan rakyat, bukan sekadar memerintah.

Dengan semangat kolaborasi ini, Sumatera Utara diyakini akan melangkah lebih cepat menuju provinsi yang maju, berdaulat, dan berkeadilan bagi seluruh warganya.**(bes)**

Musim Hujan Belum Usai, Genangan Lama

Dari Halaman 1

belum reda suara pompa yang meraung malam kemarin. Di Helvetia, Simpang Pos, Marelان, rumah-rumah sudah mulai menyiapkan ember, karung semen, dan papan pengganjal pintu. Mereka tahu rutinitas ini. Hujan turun, saluran tersumbat, dan air naik. Dan yang lebih pahit adalah aliran dana untuk penanganan banjir sudah deras, tetapi hasilnya tetap sama.

Perabotan yang baru diselamatkan kini kembali terancam. Lemari yang baru dipindah ke atas, karpet yang baru dibersihkan, semuanya bisa rusak lagi. Genangan air bukan hanya masalah ketika datang, tapi luka yang tak kunjung kering saat surut. Anak-anak akan bermain di genangan lama dengan risiko penyakit yang menunggu

diam-diam.

Jika pembangunan penanganan banjir benar-benar prioritas, maka musim hujan ini semestinya bukan lagi mimpi buruk. Tapi kenyataannya? Salran air masih dipenuhi sampah, parit kecil masih tak disentuh, dan penyedotan lumpur tetap hanya jadi slogan. Sementara itu, proyek lain yang lebih mudah dijual (trotoar, lampu, taman) tetap berjalan dengan cepat.

Warga sudah berpikir, "Untuk siapa sebenarnya pembangunan ini?" Mereka mendengar angka miliarان, melihat papan proyek, namun air tetap naik saat hujan. Mereka tahu bahwa saat anggaran naik, genangan bukan turun. Tapi yang berubah malah jenis genangannya. Karena jika anggaran benar benar sampai ke saluran-saluran itu, maka rumah mereka tak akan kebanjiran lagi.

Kementerian Haji

Dari Halaman 1

mandiri itu didasari oleh perubahan-perubahan yang sangat radikal di perkembangan ekosistem ekonomi haji.

Ia menyebut selama ini banyak jemaah dari seluruh dunia termasuk Indonesia sudah melakukan umrah mandiri. Hal itu tidak terlepas dari aturan otoritas Arab Saudi yang memang membuka peluang pelaksanaan umrah mandiri.

Pemerintah pun memasukkan ketentuan umrah mandiri di UU 14 tahun 2025 dengan tujuan melindungi jemaah asal Indonesia.

"Aturan dan regulasi Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia sangat membuka peluang itu. Nah, sehingga kita ingin melindungi seluruh jemaah umrah mandiri atau seluruh jemaah umrah kita, maka kita masukkanlah di dalam Undang-Undang untuk memastikan perlindungan terhadap jamaah umrah mandiri," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Minggu (26/10)

Dahnil menjelaskan pemerintah tidak hanya melindungi jemaah umrah mandiri, namun akan melindungi melindungi seluruh ekosistem ekonomi yang ada di dalamnya.

Ia mengatakan ketika jemaah umrah mandiri dilegalkan dalam Undang-Undang, maka saat jemaah berangkat, pemerintah akan mengambil tanggung jawab dalam perlindungannya.

"Bagaimana dengan mekanismenya? Akhirnya nanti di masa yang akan datang terkait dengan haji mandiri ini, mereka harus juga terdaftar atau melaporkan atau melakukan pemesanan, misalnya hotel, kemudian layanan-layanan lainnya di Saudi Arabia, melalui sistem nusuk yang terintegrasi antara Kementerian Haji Arab Saudi dengan Kementerian Haji Indonesia," kata Dahnil.

"Sehingga kita bisa mendapat data yang benar terkait dengan jemaah umrah yang berangkat ke Saudi Arabia dan kita bisa melakukan perlindungan terhadap jamaah-jamaah umrah tersebut," imbuh dia.

Kemudian dari sisi perlindungan ekosistem ekonomi haji, Dahnil menjawab keresahan travel-travel resmi yang khawatir usaha akan bangkrut. **(cnni/js)**

Timor Timur Resmi

Dari Halaman 1

akhirnya resmi bergabung dengan ASEAN sebagai anggota ke-11.

"Peranannya (Timor Leste) di sini melengkapi keluarga besar ASEAN, menegaskan kembali takdir bersama kita dan rasa kekerabatan regional yang mendalam," ujar Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, seperti dilaporkan AFP, Minggu (26/10).

Timor Leste mengajukan permohonan sebagai anggota tetap ASEAN pada 2011. Kemudian pada 2022, negara ini memperoleh status pengamat (observer).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Timor Leste Bendito Dos Santos sudah mengumumkan hal tersebut dalam sesi debat umum di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (29/9).

Dia berkata Timor Leste telah menempuh jalur yang berkomitmen guna memenuhi semua kriteria kelayakan sebagai anggota ASEAN.a.**(cnni/js)**



Pemuda dan Kronis Korupsi

Dari Halaman 1

Indonesia.

Setiap kali bangsa memperingati Sumpah Pemuda, kita diingatkan pada semangat perubahan dan kejujuran moral kaum muda tahun 1928. Mereka tidak hanya mengucapkan sumpah, tetapi membangun kesadaran kolektif bahwa Indonesia harus bersatu, maju, dan bermartabat. Namun sembilan puluh tujuh tahun kemudian, cita-cita itu menghadapi musuh internal bernama korupsi sebuah sistem yang menormalisasi penyimpangan, dari pusat kekuasaan hingga ruang sosial terkecil.

Pemuda hari ini lahir di tengah paradoks: mereka mewarisi kemerdekaan, tetapi juga mewarisi krisis moral yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Korupsi bukan hanya terjadi di ruang pemerintahan, tetapi telah merembes ke perilaku sosial sehari-hari: dari praktik nepotisme kecil, ketidakjujuran akademik, hingga budaya mencari jalan pintas. Penyakit ini bukan sekadar soal hukum, tetapi krisis nilai.

Dalam situasi ini, peran pemuda menjadi sangat penting sebagai “vaksin moral” bangsa. Mereka harus berani membangun budaya integritas di tengah sistem yang kerap meminggirkan kejujuran. Di era digital, tantangan itu justru semakin besar, sebab godaan materialisme dan narsisisme mudah menjebak generasi muda dalam ilusi kesuksesan instan.

Sumpah Pemuda seharusnya menjadi momentum untuk menegaskan kembali sumpah moral: bersatu melawan korupsi, menjunjung nilai kejujuran, dan menumbuhkan semangat pelayanan publik yang tulus.

Pemuda yang jujur adalah investasi paling berharga bagi bangsa. Sebaliknya, ketika generasi muda mulai permisif terhadap penyimpangan, maka masa depan bangsa sedang ditukar dengan keserakahan sesaat.

Perlawanan terhadap korupsi tak harus dimulai dari gedung megah lembaga antirasuah. Ia bisa dimulai dari diri sendiri: menolak gratifikasi dalam bentuk apapun, jujur dalam studi dan pekerjaan, serta berani mengingatkan teman atau atasan yang menyimpang. Di kampus, integritas akademik harus menjadi nilai dasar; di komunitas, transparansi dan tanggung jawab sosial perlu menjadi budaya bersama.

Kita perlu mengembalikan makna “berjuang” dalam kehidupan pemuda modern. Berjuang bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga nurani agar tidak ikut busuk oleh sistem yang korup. Dalam konteks itu, pemuda bukan sekadar agen perubahan, tetapi penjaga moral bangsa.

Jika korupsi adalah penyakit kronis, maka pemuda adalah obat yang bisa menyembuhkannya asal mereka berani menolak kompromi, tidak silau oleh jabatan, dan tidak menggadaikan idealisme. Seperti kata Bung Hatta, “Korupsi adalah musuh bersama yang hanya bisa dikalahkan oleh kejujuran.” Dan kejujuran itu kini menanti untuk dihidupkan kembali oleh generasi muda.

Sumpah Pemuda 97 tahun lalu menandai lahirnya kesadaran kebangsaan. Kini saatnya lahir kesadaran baru: Sumpah Antikorupsi Pemuda Indonesia bertumpah darah satu tanah air tanpa korupsi, berbahasa satu bangsa yang berintegritas, dan berbahasa satu: kejujuran. Sebab tanpa kejujuran, persatuan hanya akan menjadi slogan, dan masa depan bangsa hanyalah mimpi yang dikorupsi.